

2024

LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2024**



SATUAN KERJA PERANGAKAT DAERAH [SKPD]

KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT

Kata Pengantar

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah setingkat eselon III ke atas dituntut untuk mempersiapkan Perencanaan Strategik (Renstra) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya berdasarkan sasaran/kegiatan yang tercantum dalam Renstra dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu kami berusaha menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tahun 2024. Laporan ini memuat informasi tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan OPD Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang sangat mendukung terselesainya laporan ini.

Akhirnya kami mengharapkan masukan berupa kritik dan saran pembaca untuk penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, dan kiranya dapat menjadi *feed back* bagi peningkatan kinerja OPD Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya *Good Governance* di negeri tercinta.

Pulau Panggung, Januari 2024
Camat Semende Darat Laut

EDI SUPRIANTO, S.P.,M.Si
NIP.1970051519930311001

Daftar Isi

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Pelayanan OPD	1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Maksud dan Tujuan LAKIP	4
D. Format Penulisan LAKIP	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
A.1 Pernyataan Visi dan Misi	8
A.2 Tujuan dan Sasaran.....	10
B. Perencanaan Kinerja (RENJA)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SKPD	13
A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja	13
B. Analisis atas Pencapaian Sasaran Stratejik 2023	13
C. Analisis atas Pencapaian Keuangan 2023	24
BAB IV PENUTUP	35

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN PELAYANAN OPD

Kecamatan Semende Darat Laut adalah merupakan salah satu dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Sebagaimana Kecamatan yang lain OPD Kecamatan Semende Darat Laut adalah juga merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Secara rill bentuk pelayanan yang rutin antara lain memproses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Pengantar Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO), pembuatan Surat Pengantar dan rekomendasi berbagai keperluan masyarakat, legalisasi Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dan sebagainya.

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

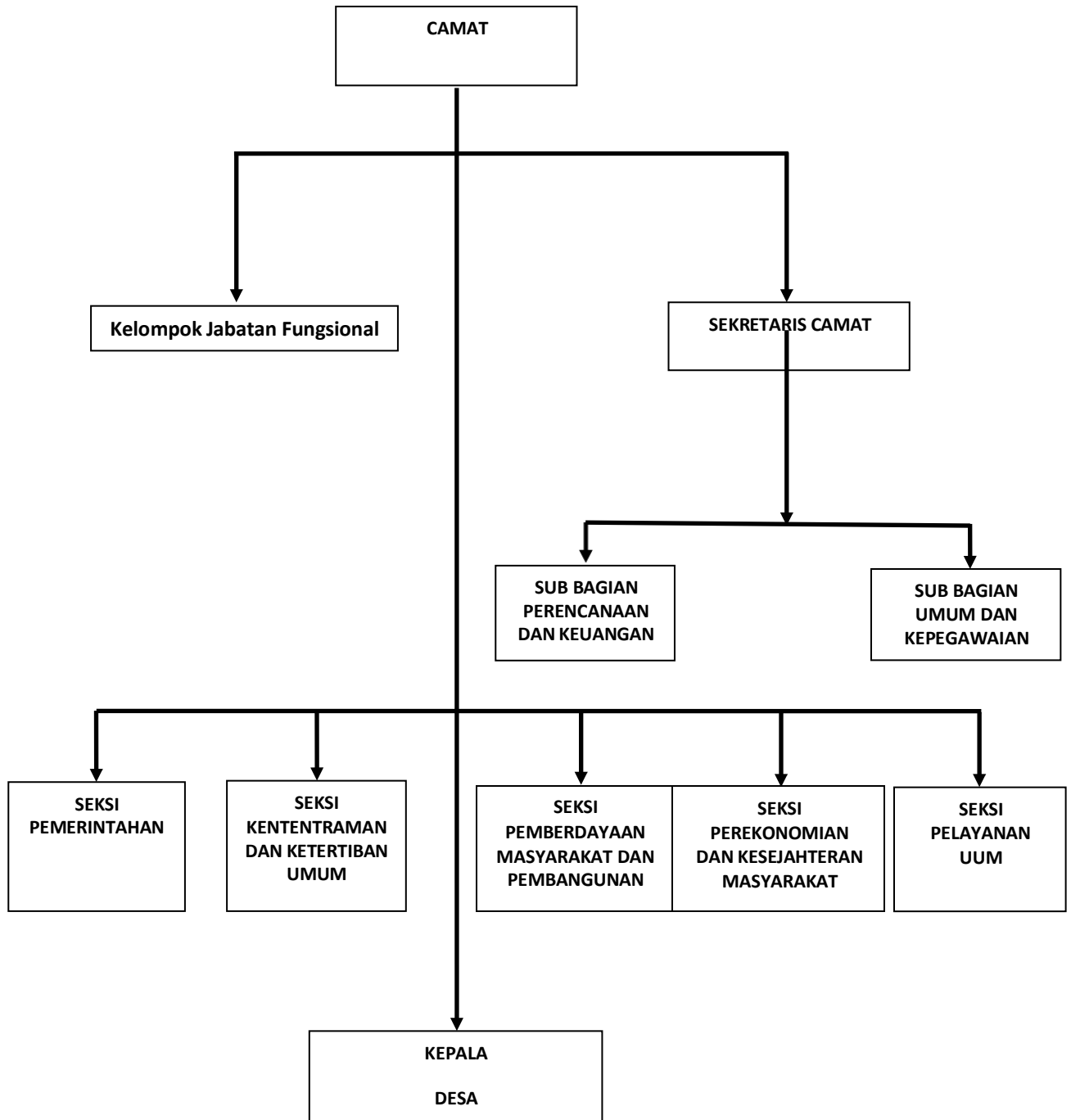
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No.16 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 26 seri D) dan Peraturan Bupati Muara Enim No. 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim, struktur organisasi OPD Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terdiri atas:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
 - a. Subbag. Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbag. Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
6. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan dapat ditampilkan dengan bagan sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN MUARA ENIM**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 16 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008



Tugas pokok dari Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan mempunyai fungsi :

- A. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang pemerintahan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- B. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- C. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri ;
- D. Pelayanan masyarakat dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di Kecamatan;
- E. Pengolahan bahan usulan ekonomi pembangunan di Kecamatan;
- F. Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- G. Pelayanan masyarakat dan fasilitasi pengaduan penyelesaian masalah;
- H. Pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- I. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di Kecamatan;
- J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang di kerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Esensi dari SAKIP bagi OPD Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Muara Enim. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur

bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik Kecamatan Semende Darat Laut dapat di penuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Stratejik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran kinerja di bangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja OPD Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi OPD Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan Masyarakat). *Kedua*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja OPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusun dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP OPD Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 mencakup hal-hal berikut ini :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban OPD Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2018. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan dan sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2022.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang

ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja OPD Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

D. FORMAT PENULISAN LAKIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja pemerintah OPD Kecamatan Semende Darat Laut selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance result*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis dan capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LAKIP tahun 2024 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum gambaran OPD Kecamatan Semende Darat Laut dengan penekanan kepada aspek strategis OPD Kecamatan Semende Darat Laut juga menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar rencana strategis yang mencakup visi dan misi serta tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Semende Darat Laut, perencanaan kinerja/rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA OPD

Dalam bab ini disajikan analisa capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja OPD Kecamatan Semende Darat Laut. Juga diuraikan alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan capaian kinerja OPD Kecamatan Semende Darat Laut tahun 2023 dan langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya. Membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka di harapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan 'bagaimana kita menuju kesana' dijawab

dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian singkat diatas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

Rencana strategis OPD Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim disusun berdasarkan hasil, yang disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen OPD Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (Lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.

Disamping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Muara Enim agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (Lima) tahun mendatang, yakni meningkatkan citra aparat, masyarakat dan kabupaten Muara Enim. Renstra dipandang sebagai :

- Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Muara Enim;
- Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi OPD Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
- Sebagai 'alat' untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan;
- Sebagai 'alat' bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik, dalam dokumen Renstra OPD Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim 2024-2026 tersebut.

A.1. Pernyataan Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah akan dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang masa depan yang di inginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi. Visi dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, menentukan sikap dan tindakan sebagai tolak ukur keberhasilan melaksanakan tugas.

Visi Kecamatan Semende Darat Laut mengacu kepada visi pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sehubungan dengan hal tersebut, visi Kecamatan Semende Darat Laut adalah:

***“ Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Semende Darat Laut Yang Sehat,
Mandiri, Agamis dan Sejahtera di Bumi Serasan Sekundang ”***

Adapun pengertian visi tersebut adalah sebagai berikut :

- ✓ **SEHAT**, mengandung makna masyarakat yang sehat baik jasmani maupun rohani yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan masyarakat, baik kebutuhan fisik maupun rohani, perilaku hidup sehat, pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas serta terciptanya lingkungan yang sehat.
- ✓ **MANDIRI**, mengandung makna masyarakat yang bertumpu pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan, berdaya saing, bersinergi dengan lembaga regional, internasional dan daerah lainnya serta didukung oleh tersedianya dana pembangunan dari sumber sendiri, infrastruktur dan lembaga pemerintahan yang memadai, birokrasi pemerintahan yang handal,serta kepastian hukum, sehingga sejajar dengan daerah lain.
- ✓ **AGAMIS**, ditandai dengan keyakinan masyarakat akan agama yang dianutnya dan melaksanakan ibadah dalam kondisi yang aman dan nyaman. Kehidupan beragama yang saling berdampingan secara rukun dan saling menghormati, serta senantiasa melaksanakan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang ditandai moral dan etika keagamaan.

- ✓ **SEJAHTERA**, ditandai terpenuhinya hak-hak dasar penduduk, meliputi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan yang layak, perumahan, lingkungan yang bersih, kehidupan beragama, kehidupan politik, keamanan dan kenyamanan serta pengembangan diri kearah yang lebih baik.
- ✓ **BUMI SERASAN SEKUNDANG**, adalah Kabupaten Muara Enim yang memiliki motto serasan sekundang, yang merupakan tekad masyarakat untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, persahabatan, kekeluargaan serta musyawarah mufakat.

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan. Misi Kecamatan Semende Darat Laut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan yang aman, agamis, tertib dan berbudaya
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

A.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi dimaksud. Adapun tujuan OPD Kecamatan Semende Darat Laut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang aman, agamis, tertib dan berbudaya
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan kinerja aparatur tingkat kecamatan dan desa

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai,

maka ditetapkan sasaran OPD Kecamatan Semende Darat Laut sebagai berikut:

1. Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang aman, agamis, tertib dan berbudaya
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya kinerja aparatur tingkat kecamatan dan desa

B. Perencanaan Kinerja (RENJA)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis tahun 2018 – 2023 disusunlah rencana kinerja (performance plan)/rencana kerja tahunan (RKT) untuk setiap tahunnya.

Rencana Kinerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini menjabarkan tentang sasaran, indikator sasaran serta target kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun kedepan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja tingkat sasaran tersebut. Dalam perencanaan kinerja (Renja)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 diuraikan sasaran – sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024, sasaran tersebut dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Tabel
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
OPD Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kehidupan yang aman, tertib dan berbudaya	a. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kecamatan	80 %
		b. Penegakan peraturan daerah (Perda)	80 %
		c. Tingkat kejadian konflik bernuansa SARA (Suku, Agama dan Ras)	0 Kejadian

2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a. Pertumbuhan ekonomi kecamatan (PDRB) dengan migas	6.64 %
		b. Jumlah Penduduk diatas garis Kemiskinan	91 %
		c. Cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum dalam kondisi baik	80 %
		d. PKK aktif	90 %
		e. Posyandu aktif	90 %
3.	Meningkatnya kinerja aparaturnya Kecamatan	a. Tingkat kepuasan layanan masyarakat	Baik

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan kerja perangkat daerah (OPD).

Penetapan kinerja tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya yang ada pada OPD Kecamatan Semende Darat Laut dengan harapan perjanjian kinerja/kesepakatan kinerja antara Kepala Satuan Perangkat Daerah (OPD) dengan atasan (Bupati) dapat diwujudkan pada setiap tahun anggaran.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	1.1 Meningkatnya kehidupan yang aman, tertib dan berbudaya	1.1.1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kecamatan	80%
		1.1.2. Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)	80%
		1.1.3. Tingkat kejadian konflik bernuansa SARA (suku, agama dan ras)	0 kejadian

2.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Semende Darat Laut	2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan(PDRB) dengan migas	6.64%
	2.1.2. Jumlah Penduduk diatas garis Kemiskinan	91%
	2.1.3. Cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum dalam kondisi baik	80%
	2.1.4. PKK aktif	90%
	2.1.5. Posyandu Aktif	90%
1.3 Meningkatnya kinerja aparatur tingkat kecamatan	1.3.1. Tingkat kepuasan layanan masyarakat	baik

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA OPD

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam menginformasikan kepada stakeholder sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam Renstra Organisasi, sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

OPD Kecamatan Semende Darat Laut sebagai salah satu pengemban amanah masyarakat Kabupaten Muara Enim, Khususnya masyarakat Kecamatan Semende Darat Laut, melaksanakan kewajiban dalam memberikan informasi atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2023.

A. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Kinerja pemerintah diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja

(performance plan) yang dibandingkan dengan realisasinya (performance result). Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

B. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2023

Secara umum OPD Kecamatan Semende Darat Laut telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Semende Darat Laut. Dari sasaran yang telah ditetapkan telah dilaksanakan 6 program dan 36 kegiatan yang berpedoman pada DPA untuk menentukan tingkat keberhasilan. Dari pelaksanaan program yang menjadi tolak ukur sasaran dengan kegiatan yang menjadi indikator kinerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Pengukuran capaian sasaran telah diupayakan dengan indikator setingkat outcome. Berdasarkan pengukuran terhadap tingkat keberhasilan terdiri dari 3 sasaran kinerja dari 9 indikator kinerja tingkat capaian sasaran dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu : pencapaian sasaran **sangat baik (≥91%)** terdiri atas 3 sasaran, pencapaian sasaran **baik (81%-90%)** terdiri atas 0 sasaran, pencapaian sasaran **cukup (71%-80%)** terdiri atas 0 sasaran, pencapaian sasaran **kurang (≤70%)** terdiri atas 0 sasaran dan pencapaian sasaran **sangat kurang (0%)** terdiri atas 0 sasaran.

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kehidupan yang aman, tertib dan berbudaya	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kecamatan	80 %	80 %	100 %
		Penegakan peraturan daerah (Perda)	80 %	80 %	100 %

		Tingkat kejadian konflik bernuansa SARA (Suku, Agama dan Ras)	0 Kejadian	0 Kejadian	0 %
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi kecamatan (PDRB) dengan migas	6,64 %	6,58 %	98 %
		Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	91 %	90,72 %	99,69 %
		Cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum dalam kondisi baik	80 %	80 %	100 %
		PKK aktif	90 %	90 %	100 %
		Posyandu aktif	90 %	90 %	100 %
3.	Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan	Tingkat Kepuasan layanan masyarakat	Baik	Baik	Baik

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kehidupan yang aman, tertib dan berbudaya

Sebagai bentuk pengukuran pencapaian terhadap sasaran tersebut dibuat 3 (tiga) indikator sasaran sebagai berikut:

a. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keindahan Ketentraman)

Terhadap indikator keberhasilan terkait penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keindahan, Ketentraman) realisasinya mencapai 100%.

Perhitungan persentase realisasi indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

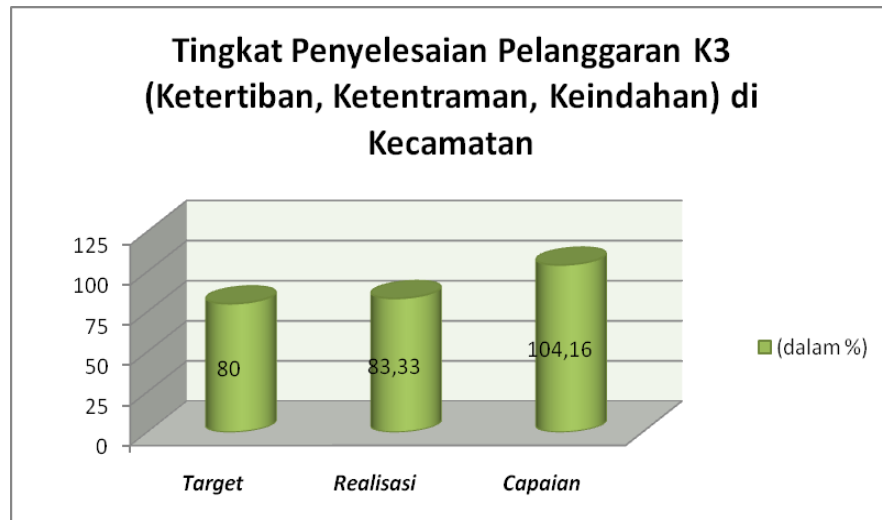
$$\begin{aligned}
 &= (\text{Jumlah Pelanggaran yang diselesaikan} / \text{Jumlah Pelanggaran}) \times 100\% \\
 &= (5 \text{ Pelanggaran} / 5 \text{ Pelanggaran}) \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Indikator sasaran ini telah dilaksanakan sesuai Renstra OPD Kecamatan

Semende Darat Laut melalui Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan

Kegiatan Pembinaan Ketertiban, Keindahan, Ketentraman dan Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pembangunan.

Persentase target, realisasi dan capaian indikator sasaran ini juga dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



b. Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)

Terhadap indikator keberhasilan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) telah dilaksanakan beberapa Perda antara lain:

1. Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023
2. Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
3. Perda tentang Perizinan
4. Perda tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa

Perhitungan persentase realisasi indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (\text{Jumlah Perda yang dilaksanakan} / \text{Jumlah Perda yang Harus dilaksanakan}) \times 100\% \\ &= (4 \text{ Perda} / 4 \text{ Perda}) \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Indikator sasaran ini telah dilaksanakan sesuai Renstra OPD Kecamatan

Semende Darat Laut melalui beberapa Program dan Kegiatan, antara lain:

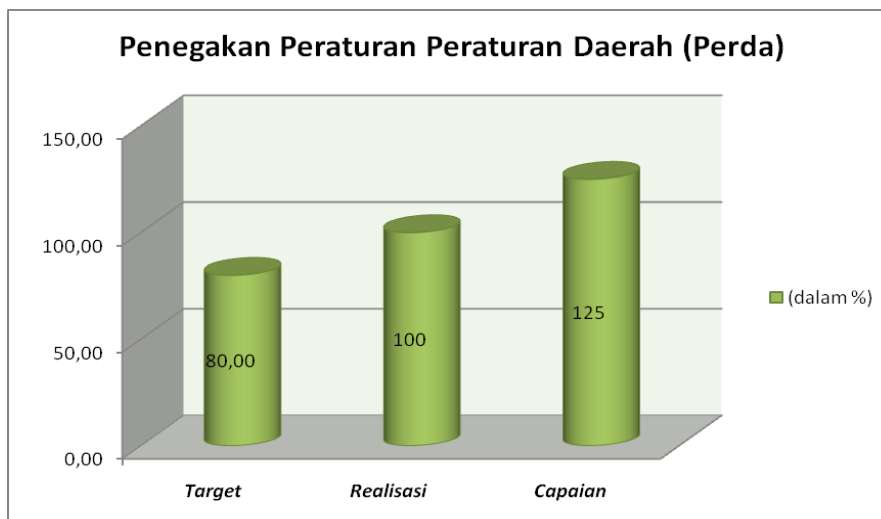
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 16 Kegiatan, yaitu:

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja
 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan
 - Kegiatan Bahan Logistik Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
2. Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Kecamatan dengan 11 (sebelas) Kegiatan, yaitu:
- Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa dan Kecamatan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan
 - Kegiatan Pembinaan MTQ
 - Kegiatan Pembinaan Desa Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten
 - Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
 - Kegiatan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
 - Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan.
 - Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
 - Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perkantoran.
 - Pembinaan Kepemudaan dan Anak

- Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Persentase target, realisasi dan capaian indikator sasaran ini juga dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



c. Tingkat kejadian konflik bernuansa SARA

Terhadap indikator keberhasilan, kejadian konflik bernuansa SARA selama tahun 2023 tidak ada kejadian (nihil), kondisi ini mencerminkan bahwa stabilitas keamanan yang kondusif khususnya kejadian konflik yang bernuansa SARA.

Indikator sasaran ini telah dilaksanakan sesuai Renstra OPD Kecamatan Semende Darat Laut melalui Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan Kegiatan Pembinaan Ketertiban, Keindahan, Ketentraman.

2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

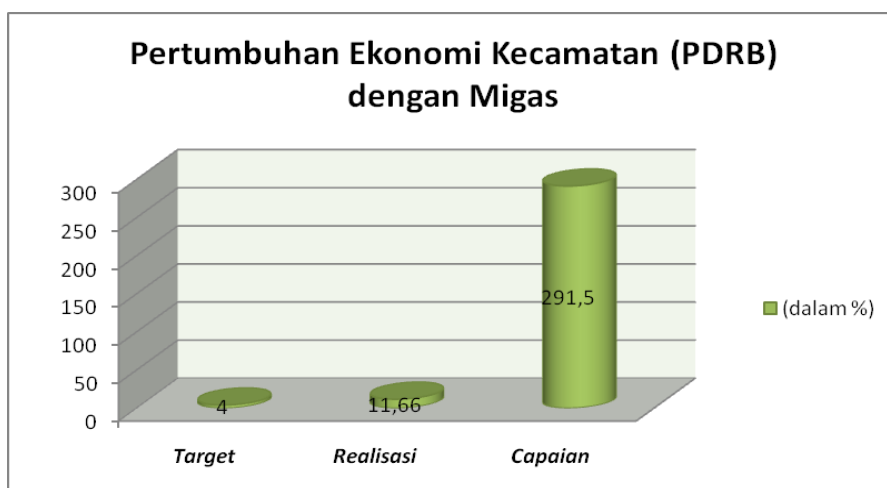
Sebagai bentuk pengukuran pencapaian terhadap sasaran tersebut, dibuat 5 indikator sasaran sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan (PDRB)

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator umum yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara makro suatu daerah adalah

dengan melihat perkembangan *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* daerah yang bersangkutan, baik dengan minyak dan gas (migas) maupun tanpa migas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan *nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen* (sumber: *Buku PDRB Kecamatan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023*). PDRB Kecamatan Semende Darat Laut adalah dengan migas 11,66%, tanpa migas 12,57%, tanpa migas dan batubara 12,57%. (Sumber: *Buku PDRB Kecamatan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023*).

Persentase target, realisasi dan capaian indikator sasaran ini juga dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



b. Kemiskinan

Indikator penduduk miskin di kecamatan Semende Darat Laut dapat dilihat melalui jumlah masyarakat yang menerima bantuan beras miskin (raskin). Selama tahun 2018 jumlah penerima raskin sebanyak 2.157 RTS (2.550 jiwa) atau sebesar 100% dari jumlah 2.157 RTS (2.550 jiwa) yang ditargetkan.

Untuk jelasnya didapat dari perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Jumlah Penerima Raskin} / \text{Jumlah Penduduk}) \\
 &= (2,550 \text{ jiwa} / 13.079 \text{ jiwa}) \times 100\% \\
 &= 15,12\%
 \end{aligned}$$

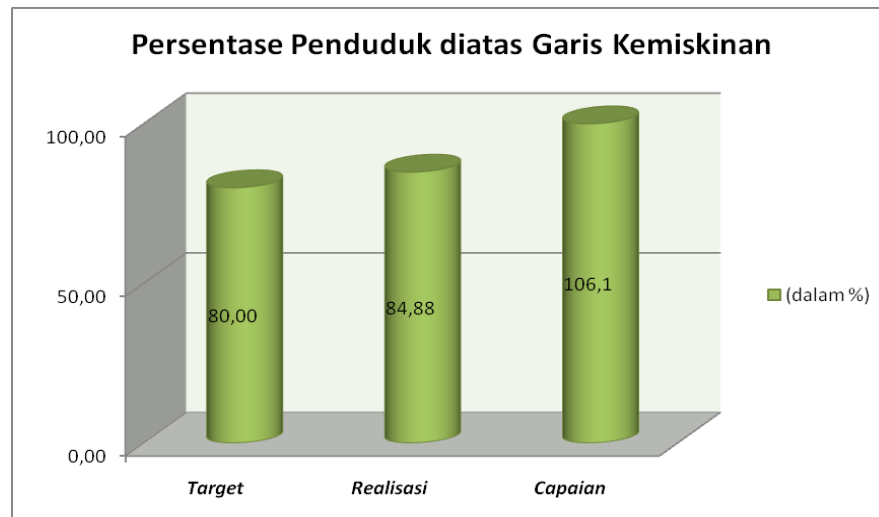
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah:

$$= 100\% - 15,12\%$$

$$= 84,88\%$$

Persentase realisasi penduduk diatas garis kemiskinan belum mencapai 100% dikarenakan ada penduduk miskin yang belum menjadi target penerima beras miskin (raskin).

Persentase target, realisasi dan capaian indikator sasaran ini juga dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



c. Cakupan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum dalam Kondisi Baik

Terkait indikator keberhasilan cakupan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum dalam Kondisi Baik realisasinya 100% dari 6 paket rencana pembangunan/rehab.

Perhitungan persentase realisasi indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

$$= (\text{Jumlah paket pembangunan (rehab) yang dilaksanakan} / \text{Target rencana pembangunan(rehab)})$$

$$= (6 \text{ Paket} / 6 \text{ Paket}) \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Indikator sasaran ini telah dilaksanakan sesuai Renstra OPD Kecamatan Semende Darat Laut melalui Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Kecamatan melalui Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi/Pembangunan Prasaran dan Fasilitas Pelayanan Umum dan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi/ Pembangunan Prasaran dan Fasilitas Perkantoran.

Telah dilakukan pembangunan ataupun rehab baik sarana dan prasarana perkantoran maupun umum di seluruh desa di Kecamatan Semende Darat Laut. Persentase target, realisasi dan capaian indikator sasaran ini juga dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



d. PKK Aktif

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

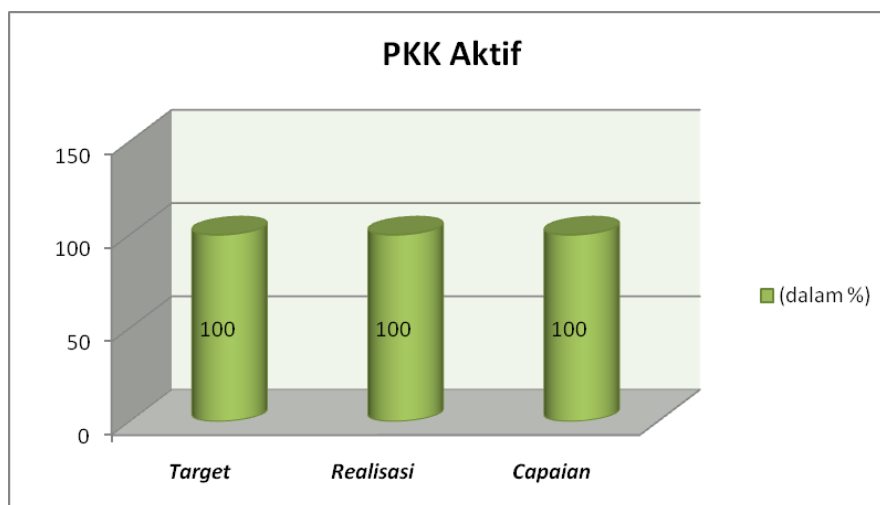
Persentase PKK aktif di Kecamatan Semende Darat Laut adalah 100% dari 10 PKK yang ada.

Perhitungan persentase realisasi indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (\text{Jumlah PKK Aktif}/\text{Jumlah PKK}) \times 100\% \\ &= (10 \text{ PKK}/10 \text{ PKK}) \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Terhadap indikator keberhasilan PKK aktif telah dilaksanakan sesuai Renstra OPD Kecamatan Semende Darat Laut melalui Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, Kepemudaan dan Anak.

Persentase target, realisasi dan capaian indikator sasaran ini juga dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



e. Posyandu Aktif

Jumlah posyandu pada tahun 2018 terdata sebanyak 10 unit dan yang terdata aktif sebanyak 10 unit atau 100%.

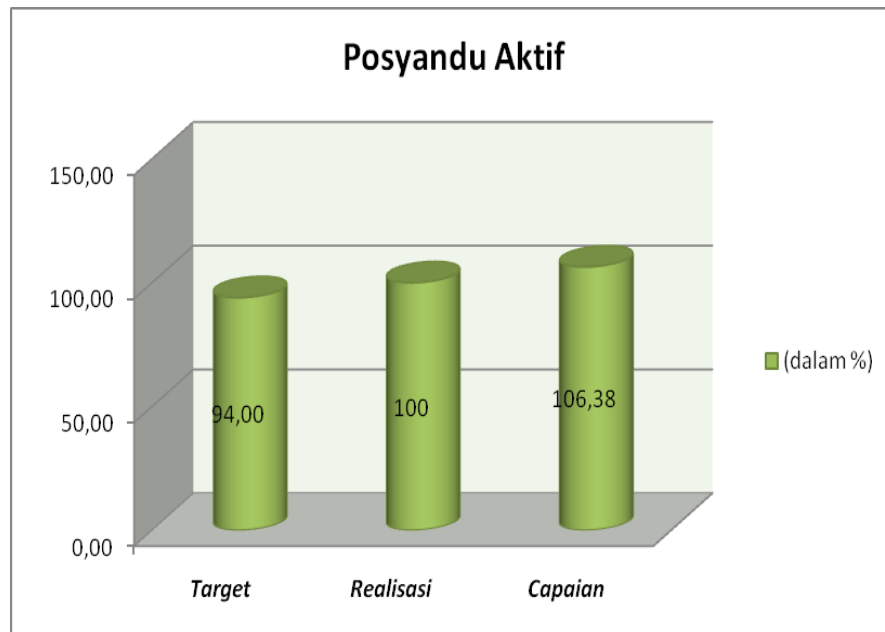
Perhitungan persentase realisasi indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (\text{Jumlah Posyandu Aktif} / \text{Jumlah Posyandu}) \times 100\% \\ &= (10 \text{ Posyandu} / 10 \text{ Posyandu}) \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Terhadap indikator keberhasilan Posyandu aktif telah dilaksanakan sesuai Renstra OPD Kecamatan Semende Darat Laut melalui Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, Kepemudaan dan Anak.

Posyandu tersebut tersebar di 10 desa di Kecamatan Semende Darat Laut. Dalam satu desa ada yang terdapat lebih dari 1 unit posyandu. Jumlah posyandu tersebut tergantung letak geografis desa dan jumlah sasaran yaitu 100 orang.

Persentase target, realisasi dan capaian indikator sasaran ini juga dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



f. Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan

Sebagai bentuk pengukuran pencapaian terhadap sasaran meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan dibuat 1 indikator sasaran yaitu ; tingkat kepuasan layanan masyarakat. Kepuasan layanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Mebeleur dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Kecamatan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) dan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi/Pembangunan Prasaran dan Fasilitas Perkantoran. ruang pelayanan perizinan (PATEN), pembangunan/rehab fasilitas perkantoran dan fasilitas umum melalui.

Berbagai pelayanan oleh aparatur antara lain pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Pengantar Surat Keterangan Catatan

Kepolisian (SKCK), Pengantar Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD), Kartu Tanda bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO), pembuatan Surat Pengantar dan rekomendasi berbagai keperluan masyarakat, legalisasi Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dan sebagainya . Pelayanan tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh OPD Kecamatan Semende Darat Laut.

C. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KEUANGAN 2022

Anggaran belanja OPD Kecamatan Semende Darat Laut setelah perubahan pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.080.044.678,83,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.631.860.178,83,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.448.184.500,-. Dengan realisasi sebesar Rp. 2.908.604.618,- atau sebesar 86,97% Target pencapaian keuangan OPD Kecamatan Semende Darat Laut mengikuti target pencapaian keuangan Kabupaten Muara Enim yaitu 85%. Tahun 2023 pencapaian keuangan OPD Kecamatan Semende Darat Laut mencapai 86,97%.

Adapun rincian pencapaian keuangan OPD Kecamatan Semende Darat Laut tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	URAIAN	PLAFON DANA (Rp)	REALISASI		KETERANGAN
I.	Belanja Tidak Langsung	1.631.860,178,83,-	1.555.459,443,-	95,31 %	
II	Belanja Langsung	1.448.184,500,-	1.353.145.175,-	93,44 %	
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	253.938.500,-	226.439.175,-	89,17 %	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.350.000,-	4.350.000,-	100 %	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.190.000,-	7.050,875,-	86,09 %	
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	5.772.000	4.938.700	85,56%	
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	4.300.000,-	1.640.400,-	38,15 %	Dikarenakan disesuaikan dengan

	Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional				jumlah pembayaran pajak yang tertera di STNK
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.680.000,-	25.680.000,-	100 %	
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.100.000,-	9.100.000,-	100 %	
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.235.500,-	13.235.500,-	99,92 %	
8.	Penyediaan cetak dan Penggandaan	3.315.000,-	3.250.000,-	98 %	
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.450.000,-	2.450.000,-	100 %	
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan	2.160.000,-	2.160.000,-	100 %	
11	Penyediaan Bahan Logistik kantor	7.920.000	0	0%	Tidak mencapai 85% dikarenakan adanya kendala teknis
12	Penyediaan makan dan minuman	5.500.000,-	5.500.000,-	100 %	
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	26.996.000,-	17.304.500,-	64.10 %	Tidak mencapai 85% dikarenakan tidak banyaknya surat perintah tugas dari Bupati untuk tugas keluar daerah
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	100.296.000,-	95.105.000,-	94,82 %	
15	Penyediaan Peralatan Kebersihan	8.994.000,-	8.994.000,-	100 %	
16	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	25.680.000,-	25.680.000,-	100 %	

B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	157.075.000,-	156.925.000,-	99,90 %	
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	47.000.000	47.000.000	100%	
2	Pengadaan Mebeleur	41.425.000,-	41.425.000,-	100 %	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.550.000,-	30.550.000,-	100 %	
4	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	38.100.000	37.950.000	99,61%	
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17.915.000,-	5.375.000,-	30 %	
1.	Pendidikan dan pelatihan Formal	6.840.000,-	0,-	0 %	Tidak mencapai 85% dikarenakan tidak banyaknya surat perintah tugas dari Bupati untuk pendidikan dan pelatihan formal, pegawai yang mengikuti diklat hanya 1 (satu) orang
2.	Bimbingan Mental Kerohanian	5.375.000,-	5.375.000,-	100 %	
3	Pengembangan Inovasi Daerah	5.700.000.-	0.-	0%	Tidak mencapai 85% dikarenakan belum siapnya bahan yang akan di tampilkan dalam inovasi
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.733.000,-	4.945.000,-	56,62 %	

1.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	965.000,-	965.000,-	100%	
2.	Penyusunan RKA dan DPA/DPPA OPD	5.697.000,-	2.930.000,-	51,43 %	Tidak mencapai 85% dikarenakan perjalanan dinas untuk keperluan penyusunan RKA/DPA dan DPPA diambil dari kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
3.	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	2.071.000,-	1.050.000,-	50.70 %	Tidak mencapai 85% dikarenakan perjalanan dinas untuk keperluan penyusunan AKIP diambil dari kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
E.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	23.245.000,-	21.270.000,-	91,50 %	
1.	Pembinaan Ketertiban, Keindahan dan Ketentraman	17.170.000,-	17.170.000,-	100 %	
2.	Fasilitasi Pembangunan perdesaan	6.075.000,-	4.100.000,-	67,49 %	Tidak mencapai 85% dikarenakan perjalanan dinas untuk keperluan kegiatan tersebut diambil dari kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
F.	Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Kecamatan	987.278.000,-	938.191.000,-	95,03 %	
1.	Penyelenggaraan Musrenbang Desa dan Kecamatan	11.504.000,-	11.390.000,-	99.03 %	

2.	Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan	61.860.000,-	60.960.000,-	98,55 %	
3.	Pembinaan MTQ	25.380.000,-	25.380.000,-	100 %	
4.	Pembinaan Desa Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten	89.220.000,-	64.708.000,-	72,53 %	Tidak mencapai 85% dikarenakan adanya perubahan di biaya sewa sarana mobilitas darat ongkos ranstra
5.	Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	29.195.000,-	29.195.000,-	100 %	
6.	Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	5.734.000,-	4.988.000,-	86,99 %	
7.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan	50.000.000,-	31.575.000,-	63.15 %	Tidak mencapai 85% dikarenakan adanya kendala rapat bulanan PKK di Kecamatan yang tidak dilaksanakan secara maksimal
8.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Pembangunan Prasaran dan Fasilitas Pelayanan Umum	350.000.000,-	347.800.000,-	99,37 %	
9.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Pembangunan Prasaran dan Fasilitas Perkantoran	100.000.000,-	99.500.000,-	99,50 %	
10	Pembinaan Kepemudaan dan Anak	173.385.000,-	171.695.000,-	99,03%	
11	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	91.000.000,-	91.000.000,-	100%	
	JUMLAH	1.448.184.500,-	1.353.144.975,-	93.44 %	

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Total alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung OPD Kecamatan Semende Darat Laut pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.631.860.178,83,-. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.555.456.443.00,- atau sebesar 95,31%. Anggaran belanja tidak langsung dialokasikan untuk belanja pegawai yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan PNS serta tambahan penghasilan PNS (Tunjangan Kinerja, uang makan dan tunjangan kesejahteraan tahunan).

2. BELANJA LANGSUNG

Total alokasi anggaran Belanja Langsung OPD Kecamatan Semende Darat Laut Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.448.184.5000,-. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.353.145,175,- atau sebesar 93,44%. Anggaran belanja langsung dialokasikan untuk 6 (enam) program, yaitu:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini secara umum masuk dalam kategori pencapaian sasaran *baik* dengan persentase realisasi sebesar 89,17% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 226,439.175,-.

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan realisasi sebesar Rp. 4.350.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 4.350.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan realisasi sebesar Rp. 7.050.875,- atau 86,09% dari anggaran Rp. 8.190.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti hanya saja realisasi dana disesuaikan dengan tagihan rekening dan karena belum adanya penagihan rekening air dari PDAM. Ke depannya akan di koordinasikan dengan pihak PDAM.
- c. Kegiatan Jasa jaminan barang milik daerah dengan realisasi Rp. 4.938.700,- atau 85,56% dari anggaran Rp. 5.772.000,- masuk dalam katagori

pencapaian sasaran sangat baik. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala.

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan realisasi sebesar Rp. 1.640.400,- atau 38,15% dari anggaran Rp. 4.500.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *kurang*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini mengalami kendala disesuaikan dengan jumlah biaya yang tertera di STNK kendaraan yang dibayarkan.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan realisasi sebesar Rp. 25.680.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 25.680.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan realisasi sebesar Rp. 9.100.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 9.100.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- g. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan realisasi sebesar Rp. 13.235.500,- atau 100% dari anggaran Rp. 13.235.500,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- h. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan realisasi sebesar Rp. 3.315.000,- atau 98,04% dari anggaran Rp. 3.250.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- i. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan realisasi sebesar Rp. 2.450.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 2.450.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- j. Kegiatan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan realisasi sebesar Rp. 2.160.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 2.160.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

- k. Kegiatan bahan logistic kantor dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 7.920.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran sangat *kurang*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini mengalami kendala teknis dalam peraturan yang mengatur kegiatan tersebut.
- l. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan realisasi sebesar Rp. 5.500.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 5.500.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- m. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan realisasi sebesar Rp. 17.304.500,- atau 64.10% dari anggaran Rp. 26.996.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *kurang*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini mengalami kendala tidak banyaknya Surat Perintah Tugas dari Bupati untuk tugas keluar daerah. Ke depannya akan ditinjau anggaran kegiatan ini untuk dikurangi.
- n. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah, dengan realisasi sebesar Rp. 95.105.000,- atau 94,82% dari anggaran Rp. 100.296.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- o. Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan, dengan realisasi sebesar Rp. 8.994.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 8.994.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- p. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, dengan realisasi sebesar Rp. 25.680.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 25.680.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini secara umum masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan persentase realisasi sebesar 97,25% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 156,925.000,-.

- a. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor, dengan realisasi sebesar Rp. 47.000.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 47.000.000,- masuk dalam

kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

- b. Kegiatan Pengadaan Mebeleur, dengan realisasi sebesar Rp. 41.425.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 41.425.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan realisasi sebesar Rp. 30.550.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 30.550.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional, dengan realisasi sebesar Rp. 37.950.000,- atau 99,61% dari anggaran Rp. 38.100.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini secara umum masuk dalam kategori pencapaian sasaran *kurang* dengan persentase realisasi sebesar 30.00% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 17.915.000,-.

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 6.840.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *kurang*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini mengalami kendala tidak banyaknya Surat Perintah Tugas dari Bupati untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan formal. Ke depannya Kecamatan Semende Darat Laut akan bersikap pro aktif mengajukan permohonan pada Bupati untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang bersifat penting dan perlu untuk di ikuti oleh pegawai.
- b. Kegiatan Bimbingan Mental Kerohanian, dengan realisasi sebesar Rp. 5.375.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 5.375.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- c. Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah, dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 5.700.000,- masuk dalam katagori sangat

kurang dalam pelaksanaannya kegiatan ini mengalami kendala belum adanya bahan yang akan di adakan dalam kegiatan inovasi.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini secara umum masuk dalam kategori pencapaian sasaran sangat kurang dengan persentase realisasi sebesar 56,62% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 8.733.000,-.

- a. Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan realisasi sebesar Rp. 965.000,- atau 100% dengan anggaran Rp. 965.000,- masuk dalam katagori pencapaian sasaran sangat baik dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- b. Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA/DPPA OPD, dengan realisasi sebesar Rp. 2.930.000,- atau 51,43% dari anggaran Rp. 5.697.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran kurang. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti hanya saja biaya perjalanan dinas diambil dari Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah. Ke depannya akan ditinjau penghapusan anggaran perjalanan dinas kegiatan ini dan dialihkan ke Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah.
- c. Kegiatan Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dengan realisasi sebesar Rp. 1.050.000,- atau 50.70% dari anggaran Rp. 2.071.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *kurang*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti hanya saja biaya perjalanan dinas diambil dari Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah. Ke depannya akan ditinjau penghapusan anggaran perjalanan dinas kegiatan ini dan dialihkan ke Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah.

5) Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program ini secara umum masuk dalam kategori pencapaian sasaran sangat baik dengan persentase realisasi sebesar 91.50% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 23.245.000,-.

- a. Kegiatan Pembinaan Ketertiban, Keindahan dan Ketentraman, dengan realisasi sebesar Rp. 17,170.000,- atau 100% dari anggaran Rp.17.170.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- d. Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Desa, dengan realisasi 4.100.000,- atau 67.49% dari anggaran Rp. 6.075.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *kurang*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti hanya saja biaya perjalanan dinas diambil dari Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah. Ke depannya akan ditinjau penghapusan anggaran perjalanan dinas kegiatan ini dan dialihkan ke Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah.

6) Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Kecamatan

Program ini secara umum masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan persentase realisasi sebesar 95,03% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 987.278.000,-.

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa dan Kecamatan, dengan realisasi sebesar Rp. 11.504.000,- atau 99,01% dari anggaran Rp. 11.390.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan, dengan realisasi sebesar Rp. 60.960.000,- atau 98,55% dari anggaran Rp. 61.860.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- c. Kegiatan Pembinaan MTQ, dengan realisasi sebesar Rp. 25.380.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 25.380.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- d. Kegiatan Pembinaan Desa Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dengan realisasi sebesar Rp. 64.708.000,- atau 72.53% dari anggaran Rp. 89.220.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *kurang*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti hanya

- saja biaya ongkos sewa kendaraan dalam pendistribusian raskin adanya perubahan.
- e. Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN), dengan realisasi sebesar Rp. 29.195.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 29.195.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
 - f. Kegiatan Penerapan Teknologi Tepat Guna, dengan realisasi Rp. 4.988.000,- atau 86,99% dari anggaran Rp. 5.734.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
 - g. Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, dengan realisasi sebesar Rp. 31.575.000,- atau 63,15% dari anggaran Rp. 50.000.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran kurang. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini mengalami kendala yang dikarenakan pelaksanaan rapat bulanan PKK tidak terlaksana secara maksimal.
 - h. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum, dengan realisasi sebesar Rp. 347.800.000,- atau 99,37% dari anggaran Rp. 350.000.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
 - i. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perkantoran, dengan realisasi sebesar Rp. 99.500.000,- atau 99,50% dari anggaran Rp. 100.000.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
 - j. Kegiatan pembinaan kepemudaan dan Anak, dengan realisasi sebesar Rp. 171.695.000,- atau 99,03% dari anggaran Rp. 173.385.000,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
 - k. Kegiatan Pemeliharaan penerangan jalan umum dengan realisasi sebesar Rp. 91.000.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 91.000.000,- masuk dalam

kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2023, yakni :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).
2. Pengukuran kinerja dalam LAKIP dilakukan dengan menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisa akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dilakukan berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun instansi pemerintahan dengan total kegiatan mencapai 36 kegiatan yang tercakup dalam 6 program. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan indikator kinerja input, output dan outcome.
 - a. Pencapaian sasaran sangat baik ($\geq 91\%$) terdiri atas 3 program yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 99,90%, Program Penataan Daerah Otonomi Baru sebesar 91,50% dan Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Kecamatan sebesar 95,03%
 - b. Pencapaian sasaran baik (81% - 90%) terdiri atas 1 program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 89,17%
4. Pencapaian sasaran kurang $\leq 70\%$ terdiri atas 2 program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 30,00% , dan Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan sebesar 56,67%

5. Hasil Pengukuran dan analisa pencapaian sasaran strategis terhadap indikator kinerja setingkat outcome dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu **sangat baik** dengan tingkat capaian $\geq 91\%$, **baik** dengan tingkat capaian 81% - 90%, **cukup** dengan tingkat capaian 71% - 80% dan **kurang** dengan tingkat capaian $\leq 70\%$ dan **sangat kurang** dengan tingkat capaian 0 %. Pencapaian sasaran sangat baik ($\geq 91\%$) terdiri atas 3 sasaran atau 100% dari total sasaran.
6. Pada tahun 2023 untuk OPD Kecamatan Semende Darat Laut dialokasikan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.631.860.178,83,-, dengan realisasi sebesar Rp. 1.555.459.443,- atau 95,31%. Alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.448.184.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.353.145.175,- atau 93.44%.

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Kecamatan Semende Darat Laut Tahun 2024 ini dibuat, kiranya dapat menjadi masukan guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Atas segala perhatian diucapkan terimakasih.

Pulau Panggung, Januari 2024
CAMAT SEMENDE DARAT LAUT

EDI SUPRIANTO, S.P,M.Si
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP.197005151993031 1 001